INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA
Sekretariat: Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810 Indonesia
Telp/Fax: (62-21) 87961780 WhatsApp: +62 811 992 0114
Email: sekretariat@ifcc-ksk.org | www.ifcc-ksk.org

SIARAN PERS

Tutup Tahun 2025: IFCC Tandatangani 2 MoU Strategis dengan Ditjen PHL Kemenhut RI dan APHI untuk Perkuat Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global

Jakarta - Selasa, 25 November 2025 – IFCC berhasil menutup akhir tahun 2025 dengan sebuah gebrakan santun nan elegan. Hari ini 2 (dua) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/*MoU) strategis telah ditandatangani oleh IFCC. Penandatanganan ini berlangsung di sela-sela seminar nasional bertajuk "Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global" yang digelar di Golden Ballroom 3 – The Sultan Hotel & Residence, jl. Gatot Subroto. Seminar setengah hari di penghujung tahun 2025 ini merupakan upaya strategis IFCC untuk memperkuat posisi produk hasil hutan Indonesia di pasar global.

MoU IFCC dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PHL, Kemenhut RI)

Inisiatif ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan IFCC selaku pemilik dan pengembang skema sertifikasi hutan lestari dalam memajukan hutan Indonesia melalui peningkatan standar sertifikasi dan promosi bersama agar produk hasil hutannya dapat memperoleh penerimaan yang lebih besar di pasar internasional.

Dalam *keynote speech*-nya pada seminar setengah hari tersebut, **Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.** mengajak untuk bersama-sama mempromosikan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara tropis terbesar telah memiliki sistem dan regulasi yang menjamin pengelolaan hutan yang *sustainable*. Meski demikian, Laksmi mengakui bahwa sistem dan regulasi tersebut belum sempurna karena masih banyak tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat instrumen-instrumen tata kelola sehingga mampu memberikan data dan fakta yang akurat untuk menjamin ketertelusuran bahan baku yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbicara mengenai instrumen tata kelola, Laksmi menyebutkan dengan gamblang bahwa sertifikasi adalah instrumen yang sangat penting dalam memastikan praktik pengelolaan hutan yang kredibel. Tidak hanya itu, pemenuhan terhadap kebijakan dan persyaratan pasar global yang semakin ketat turut menjadi tuntutan bagi pengelola hutan di Indonesia. "Setiap sistem sertifikasi memiliki *objective* masing-masing, namun kebutuhan pasar dan pembuat kebijakan yang terus bertambah menyebabkan *objective* berkembang semakin luas," tandasnya. Dalam kesempatan tersebut, Laksmi menekankan agar IFCC sebagai pemilik skema sertifikasi

kehutanan nasional terus aktif mendorong bahwa aspek produksi, ekologi dan sosial adalah hal-hal yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan hutan secara lanskap.

Implementasi sertifikasi di Indonesia tidak lepas dari Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikenal dengan skema sertifikasi *mandatory* dan skema-skema sertifikasi *voluntary*, seperti IFCC. Senada dengan yang diungkapkan oleh Dirjen PHL Kementerian Kehutanan RI, **Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH), Ir. Erwan Sudaryanto, M.M** menegaskan, "Kita bersatu, bersama-sama mempromosikan SVLK sebagai instrumen pengelolaan hutan lestari." Selanjutnya, menyoroti tentang sinergi antar instansi, Erwan menegaskan tentang apresiasi terhadap organisasi yang mendorong kepatuhan terhadap regulasi nasional. "Karena SVLK sebagai syarat IFCC, jadi kami bersinergi untuk memajukan pengelolaan hutan lestari di Indonesia," tegasnya.

Mengkomunikasikan edukasi tentang pengelolaan hutan lestari tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sinergi, kolaborasi dan kerjasama penting untuk diwujudkan demi sebuah rangkaian materi edukasi yang utuh, konstruktif dan berbasis fakta. "Kita bersama bersinergi mempromosikan SFM (*sustainable forest management*) dengan cerita yang utuh, bukan indah tapi tidak *relatable*, " tegas Laksmi dengan elegan.

Hal senada juga dinyatakan oleh **Ketua Umum IFCC, Saniah Widuri, S.H., L.LM.** dalam sambutannya bahwa sebagai organisasi berbadan hukum Indonesia, IFCC memiliki misi untuk mempromosikan hutan lestari melalui pengembangan standar sertifikasi hutan lestari berdasarkan kondisi nasional Indonesia. "Dalam standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC terdapat klausul yang menyebutkan bahwa organisasi harus mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK. Ini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) apabila ingin mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC," tandas Saniah.

MoU IFCC dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Melanjutkan kerjasama sebelumnya, IFCC dan APHI sepakat menandatangani MoU untuk memperkuat sinergi dalam hal peningkatan kapasitas pelaku usaha supaya siap menghadapi persaingan global. Cerita tentang sinergi tentu harus diawali dengan komitmen kuat dari para pelaku usaha pemanfaatan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing sektor kehutanan Indonesia. APHI sebagai organisasi yang mewadahi para pemegang PBPH terus berkomitmen dalam mendorong praktik pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

Ungkap pandangan dari sisi bisnis, **Ketua Umum APHI, Dr. Ir. Soewarso, M.Si., IPU**., dalam sambutannya pada seminar, menegaskan bahwa, "Tekanan pasar dan regulasi global (termasuk EUDR) makin nyata. Sertifikasi hutan dan rantai pasok bersertifikat menjadi semakin tak terhindarkan bagi usaha hasil hutan yang ingin bersaing di pasar global. Dalam konteks ini, peran sertifikasi IFCC, sebagai standar sukarela yang berbasis sistem nasional dan diakui secara internasional, menjadi sangat strategis. Skema ini membantu menjawab tantangan legalitas dan keberlanjutan yang makin ketat, baik dari sisi pasar maupun regulasi." Lebih lanjut, Soewarso menyatakan bahwa peningkatan kapasitas anggota APHI dalam penerapan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan percepatan penerapan sertifikasi IFCC oleh para anggota APHI di seluruh Indonesia merupakan 2 (dua) hal yang menjadi prioritas utama APHI.

Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Taklukkan Pasar Global: Langkah-langkah Strategis

Dalam seminar tersebut, dengan dipandu oleh **Sekretaris Jenderal APHI, Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E** sebagai moderator, digelar sesi diskusi panel untuk menggali lebih dalam tentang implementasi sertifikasi SVLK dan IFCC di Indonesia. Mewakili pemerintah, dalam paparannya, Ir. Erwan Sudaryanto, M.M menekankan tentang kewajiban untuk patuh pada regulasi negara terlebih dahulu (SVLK) sebelum memenuhi regulasi pasar global (PEFC, EUDR dan regulasi pasar global lainnya). Hal senada diungkapkan oleh **Ketua Bidang Sertifikasi, Akreditasi dan Pelatihan – Badan Pengurus IFCC, Nurcahyo Adi**, "SVLK disebutkan secara eksplisit di standar IFCC sebagai pra syarat sertifikasi IFCC." Menyoroti tentang sinergi pemerintah dan pelaku usaha, Nurcahyo mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh kedua belah pihak, antara lain: efisiensi pelaksanaan sertifikasi *mandatory* dan *voluntary* di PBPH, penempatan logo SVLK dan PEFC yang berdampingan dapat meningkatkan *awareness* pelaku pasar mancanegara terhadap logo SVLK.

Perwakilan pelaku usaha kehutanan, **Kurniadi Suherman (APP Sinarmas Group)** dan **Khaerul Basyar (APRIL Group)**, dalam paparannya menekankan tentang pentingnya memperkuat sinergi skema sertifikasi *mandatory* dan *voluntary* melalui promosi bersama untuk menguatkan pengelolaan hutan lestari dan sistem kebertelusuran produk hasil hutan. Lebih lanjut, kedua pembicara juga mengajak para pihak untuk menggunakan produk-produk hasil hutan lestari Indonesia yang terdapat logo SVLK dan PEFC, demi produk Indonesia berjaya, melenggang dengan anggun, melangkah pasti di pasar global.

Ekspektasi dan Komitmen Para Pihak

Menutup *keynote speech*-nya, Dirjen PHL, Laksmi Wijayanti menuturkan harapannya kepada IFCC, "Peran IFCC/PEFC, agar terus berinovasi dalam sertifikasi dengan memasukkan dan menggabungkan semua aspek lingkungan, tanggung jawab sosial sebagai bagian yang semakin tidak terpisahkan dari bisnis kehutanan." Selanjutnya, Laksmi menggarisbawahi bahwa setelah ditandatanganinya MoU ini, diperlukan rencana bersama untuk dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum APHI, Soewarso menambahkan, "Penandatanganan MoU ini akan menjadi langkah nyata menuju tata kelola hutan yang semakin profesional, bersertifikat, dan berkelanjutan, " tutur Soewarso. "Terakhir, semoga kerjasama ini dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya," pungkas Saniah Widuri, Ketua Umum IFCC.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan volume ekspor produk hutan Indonesia dan dapat turut memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang sangat serius dalam menjalankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Memenuhi harapan Dirjen PHL, Kementerian Kehutanan RI, para pihak dalam MoU berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin kesepahaman tersebut dengan perjanjian kerjasama yang rinci dan terukur.

Ketua Umum IFCC, Saniah Widuri, S.H., L.LM. dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari – Kementerian Kehutanan RI, Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. menandatangani MoU tentang Kerjasama SVLK dan IFCC/PEFC

Kontak Media:

Zulfandi Lubis, S.H.
Direktur Eksekutif IFCC
(081584153379)

Tentang Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan RI

Direktorat Jenderal ini berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, pengelolaan usaha kehutanan, serta pengawasan terhadap hasil hutan dan kontribusinya terhadap perekonomian. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan kelestariannya.

Tentang *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC)

IFCC adalah suatu organisasi nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia, melalui penerapan sertifikasi kehutanan yang memenuhi tolok ukur pengelolaan hutan lestari PEFC. Didirikan pada tanggal 9 September 2011, IFCC telah secara resmi menjadi *National Governing Body* PEFC di Indonesia sejak November 2012 dan sejak 1 Oktober 2014 skema pengelolaan hutan lestari IFCC telah resmi memperoleh *endorsement* dari PEFC *Council*.

Sejak resmi memperoleh *endorsement* PEFC hingga saat ini seluas hampir 5 juta hektar hutan di Indonesia telah tersertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC/PEFC dan sebanyak lebih dari 60 perusahaan di Indonesia telah tersertifikasi lacak balak/*chain of custody* PEFC/IFCC. Jumlah di atas diharapkan dapat terus bertambah dengan dibukanya kesempatan bagi lembaga-lembaga sertifikasi Indonesia untuk mengajukan akreditasi IFCC/PEFC kepada KAN, sehingga akan semakin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia baik skala kecil maupun menengah yang dapat menembus pasar global melalui sertifikasi IFCC/PEFC.

Tentang *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC)

PEFC adalah organisasi nirlaba yang merupakan aliansi global dari sistem-sistem sertifikasi hutan nasional di berbagai negara. PEFC didirikan dengan tujuan untuk mengedepankan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi pihak ketiga independen. Sejak didirikan pada tahun 1999, seluas lebih dari 300 juta hektar hutan di dunia telah bersertifikat pengelolaan hutan lestari PEFC dan hampir 30 ribu perusahaan dari berbagai negara di dunia telah memperoleh sertifikasi *chain of custody* PEFC.

Tentang Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Didirikan pada tanggal 21 November 1983, APHI bertujuan mengembangkan, meningkatkan dan melindungi usaha para anggotanya sesuai kaidah peraturan perundangan dalam rangka peningkatan nilai hutan yang lestari untuk mendorong terciptanya daya saing usaha industri kehutanan. Sebagai perkumpulan, APHI merupakan mitra pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, yang berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, dalam rangka kegiatan usaha yang bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan profesional.

Salam Hutan Lestari

To Sustainability and Beyond